

DINAMIKA PENETAPAN GELAR ADAT OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) RIAU TAHUN 2018

Oleh: Rizka Fitri

rizkaafitrii@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Based on the Regional Regulation of Riau Province Number 1 of 2012 about the Malay Custom Institution of Riau in Chapter 17 Verse 3 states that the institution may give customary degree to the decent figures according to their services to the community and Riau region. Moreover, Chapter 29 Verse 1 of the institution Bylaws states that the institution may give the degree to the figures based on their plot, decent, and properness. The degree is divided into two: the Customary Degree and the Honor Customary Degree. Afterwards, the determination process of the customary degree by the institution is carried out through four main steps: pre-degree awarding, selection, endorsement and confirmation. The study aims to (1) to describe the dynamic of customary degree determination by the Malay Custom Institution of Riau in 2018: Ustadz H. Abdul Somad, Lc., M.A; H. Sutardji Calzoum Bachri; Ir. H. Joko Widodo. (2) to describe some factors which affect the degree determination by the Malay Custom Institution of Riau in 2018: Ustadz H. Abdul Somad, Lc., M.A; H. Sutardji Calzoum Bachri; Ir. H. Joko Widodo. Furthermore, the study employed a qualitative research method. The data were collected from the research informant, documents, and printed media. The data were collected through interview and documentation. While the data were analyzed by using qualitative data analysis technique. The findings of the study show that the dynamic of customary degree determination which was carried out by the Malay Custom Institution of Riau to Ustadz H. Abdul Somad, Lc., M.A dan H. Sutardji Calzoum Bachri was procedurally correct, while the degree to Ir. H. Joko Widodo was not. The involvement of the institution in politics has led to various counter responses from the members of the institution, Riau Community Organizations, Riau non-governmental organizations, and Riau activists. Some factors which affected the determination were because of the services from each of those figures and the political interest from one of them.

Keywords: *Formulation, Dynamic, Custom Institution*

PENDAHULUAN

Lembaga Adat Melayu Riau, selanjutnya disingkat LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau.¹ LAM Riau resmi didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru. Pemrakarsanya, tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentukan lembaga ini ialah Gubernur Riau waktu itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau menyatakan, “Perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta *membangkitkan batang terendam* yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau”. *Batang terendam* itu ialah jati diri/identitas budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Pasal 17 ayat 3 bahwa LAM Riau dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-

jasanya terhadap masyarakat dan daerah Riau. Gelar ini terbagi dua, yaitu: Gelar Adat adalah nama/sebutan yang diberikan kepada tokoh secara perorangan sesuai jabatan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau; Gelar Adat Kehormatan adalah penghormatan yang diberikan oleh LAM Riau kepada tokoh secara perorangan yang dianggap berjasa dalam meningkatkan harkat, martabat, dan pelestarian adat budaya Melayu Riau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.³ Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dapat memberi gelar adat kepada tokoh sesuai menurut alur, patut dan layaknya.⁴ Untuk memperoleh gelar adat berdasarkan jasa, harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:

1. Berjasa luar biasa terhadap pelestarian, harkat, dan martabat adat-budaya dan masyarakat adat Melayu dalam arti yang luas;
2. Gelar Adat dan Gelar Adat Kehormatan yang diberikan hanya berlaku untuk yang bersangkutan, tidak dapat diturunkan kepada ahli warisnya;
3. Gelar Adat dan Gelar Adat Kehormatan yang diberikan kepada yang bersangkutan bersama proses penilaian dan penetapannya, diputuskan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Majelis Kerapatan

¹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

² <https://lamriau.id/profil-lam-riau/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 12.25 WIB.

³ <https://lamriau.id/ketentuan-pemberian-gelar-adat-lam-riau/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 12.25 WIB.

⁴ *Op. Cit.*, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAM Riau Tahun 2012-2017, hlm:26.

- Adat Lembaga Adat Melayu Riau;
4. Calon penerima Gelar Adat dan Gelar Adat Kehormatan dapat diusulkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau untuk kemudian dinilai dan ditetapkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau;
 5. Calon penerima Gelar Adat dan Gelar Adat Kehormatan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.⁵

Sebelum pemberian gelar adat, setiap tokoh harus melalui proses pemberian gelar adat dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pra Pemberian Gelar
 - a. Lembaga Adat Melayu Riau menerima usulan pemberian gelar secara internal dari Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi dan atau kabupaten/kota;
 - b. Usulan juga dapat diterima dari perorangan dan atau kelompok masyarakat Melayu Riau;
 - c. Lembaga Adat Melayu Riau membentuk Tim Penapis Pemberian Gelar.
2. Pemilihan
 - a. Tim Penapis Pemberian Gelar menerima, meneliti, mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima gelar;
 - b. Tim Penapis Pemberian Gelar menyampaikan hasil kerjanya kepada Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau;

berdasarkan jasa tahun 2018 sebagai berikut :

- c. Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau melaksanakan rapat untuk membahas dan menetapkan pemberian gelar.
3. Pengesahan
 - a. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Gelar;
 - b. Menetapkan nama/sebutan gelar berikut atribut/kelengkapan yang akan dipakai penerima gelar;
 - c. Menerbitkan Warkah Pengukuhan/Penabalan Gelar Adat.
4. Pengukuhan Pelaksanaan Pengukuhan/Penabalan Gelar Adat dilaksanakan pada:
 - a. Peringatan Hari Jadi Lembaga Adat Melayu Riau;
 - b. Hari-hari lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau;
 - c. Pengukuhan dilaksanakan dalam upacara penabalan dengan segala aturan acaranya yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau.⁶

LAM Riau telah memberikan gelar adat berdasarkan jasa sejak tahun 1986. Mulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2018 sudah sembilan tokoh yang diberikan gelar adat. Adapun daftar nama tokoh yang menerima gelar adat dari LAM Riau

⁵ *Op. Cit.*, <https://lamriau.id/ketentuan-pemberian-gelar-adat-lam-riau/>, diakses

pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 12.25 WIB.

⁶*Ibid.*,

Tabel 1.1 Daftar Nama Tokoh yang Menerima Gelar Adat dari LAM Riau Berdasarkan Jasa Tahun 2018

No	Nama Tokoh	Gelar Adat Kehormatan	Tanggal Pemberian Gelar Adat	Alasan Pemberian Gelar Adat
1	Ustadz H. Abdul Somad, Lc., M.A	Datuk Seri Ulama Setia Negara	Selasa, 20 Februari 2018	Telah memajukan adat dan budaya Riau melalui dakwah-dakwahnya.
2	H. Sutardji Calzoum Bachri	Datuk Seri Pujangga Utama	Rabu, 7 November 2018	Telah memberi sumbangan luar biasa bagi kemajuan sastra Indonesia dan khususnya Riau.
3	Ir. H. Joko Widodo	Datuk Seri Setia Amanah Negara	Sabtu, 15 Desember 2018	Riau telah bebas dari kabut asap selama tiga tahun terakhir; Penetapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Program TORA; Penetapan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit; Penetapan Pertamina sebagai pengelola Blok migas Rokan di Provinsi Riau mulai 2021; Pembangunan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Riau; Penetapan program perhutanan sosial.

Sumber : Lembaga Adat Melayu Riau

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa LAM Riau memberikan gelar adat kepada tokoh yang sudah berjasa, yaitu : *Pertama*, LAM Riau memberikan gelar adat kehormatan Datuk Seri Setia Ulama Negara kepada Ustadz Abdul Somad pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018. Ketua Umum MKA LAM Riau Al azhar mengatakan gelar adat kehormatan diberikan kepada seorang ulama, begitu berjasa dan terkenal saat ini. Baru pertama kali gelar adat kehormatan diberikan kepada tokoh agama. Kehadiran Ustadz Abdul Somad yang asli Riau ini sangat berpengaruh terutama untuk kalangan muda. Bahkan untuk

kalangan tertentu, dengan mendengar ceramahnya, banyak yang tertarik dan mengubah perilaku. Jasanya menyampaikan ceramah itulah LAM Riau memberi gelar adat kehormatan. Gelar itu tumbuh dari perasaan terdalam pemberinya. Harkat dan martabat Riau dalam kesatuan terangkat oleh Ustadz Abdul Somad.⁷ Pemberian gelar adat kehormatan merupakan bentuk dari jasa-jasa Ustadz Abdul Somad yang telah memajukan adat dan budaya Riau melalui dakwah-dakwahnya. Jasa yang luar biasa kepada adat serta

⁷<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/31/ustaz-abdul-somad-akan-terima-gelar->

adat-kehormatan-dari-lam-riau, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 16.04 WIB.

budaya Melayu maupun kemanusiaan.⁸

Kedua, LAM Riau memberikan gelar adat kehormatan Datuk Seri Pujangga Utama kepada Sutardji Calzoum Bachri pada hari Rabu tanggal 7 November 2018. Ketua Umum MKA LAM Riau Al azhar mengatakan gelar tersebut merujuk pada sisi pengabdian yang diperlihatkan Sutardji Calzoum Bachri secara luar biasa. Ia tidak saja sastrawan, tetapi pemikir sastra, bahkan mengimplementasikan nilai-nilai pemuliaan terhadap manusia dalam kehidupannya. Ia adalah sastrawan yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir dengan berbagai pencapaian khusus yang menunjukkan sebagai suatu keutamaan. Sutardji Calzoum Bachri secara berani dan berhasil mengusung jati dirinya menjadi sesuatu yang tidak saja Indonesia, tetapi sastra secara umum. Bagi Riau, hal tersebut menjadi makin bermakna karena dengan sadar ia berpijak pada tradisi yang ada di kawasan ini antara lain mantera sebagai medium pengabdian kata-kata, dalam alam Melayu banyak sekali ungkapan senada, misalnya tergambar dari makna bahasa menunjukkan bangsa. Hal ini pasti lahir dari kepedulian yang besar terhadap keberadaan bahasa.⁹ Gelar adat kehormatan diberikan kepada Sutardji Calzoum Bachri karena ia memberi sumbangan luar biasa bagi kemajuan sastra Indonesia dan khususnya Riau. Lahir di Rengat 24

Juni 1941, dengan memanfaatkan tradisi Melayu Riau sejak tahun 70-an, ia menjadi sastrawan utama Indonesia. Alasan-alasan tersebut menyebabkan LAM Riau khususnya merasa bangga. Gelar adat kehormatan merupakan salah satu bentuk perasaan LAM Riau tersebut.¹⁰

Ketiga, LAM Riau juga memberikan gelar adat kehormatan Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018. Ketua Umum DPH LAM Riau Syahril Abu Bakar mengatakan gelar ini diberikan kepada Joko Widodo atas jasanya terhadap Riau yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Syahril menjelaskan pihaknya memberikan gelar adat kepada Joko Widodo dengan beberapa alasan, di antaranya yaitu:

1. Riau telah bebas dari kabut asap selama tiga tahun terakhir yaitu mulai 2016, 2017 hingga saat ini 2018. Sebelumnya selama 17 tahun daerah itu selalu menderita bencana kabut asap;
2. Penetapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Program TORA yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikat Tanah;
3. Penetapan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit, dengan tujuan memberi peluang kepada masyarakat

⁸<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/01/31/gelar-adat-untuk-uas-disebut-spesial-ini-penjelasan-lam-riau>, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.09 WIB.

⁹<http://riaupos.co/189959-berita-sutardji-akan-dapat-gelar-datuk-seri-pujangga>

utama.html#.XFoljNizbIV, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.25 WIB.

¹⁰<https://riauterkini.com/sosial.php?arr=138392&judul=Besok,-Sutardji-Terima-Gelar-Adat--Datuk-Seri-Pujangga-Utama>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 23.37 WIB.

untuk mengambil haknya disaat penemuan adanya sebanyak 1,8 juta hektare kebun sawit berstatus ilegal;

4. Penetapan Pertamina sebagai pengelola blok migas Rokan di Provinsi Riau mulai 2021 mendatang, yang selama ini dikelola perusahaan asing hingga mendekati 100 tahun atau sejak sebelum era kemerdekaan. Penetapan ini juga memberi ruang Riau mendapatkan hak partisipasi sebesar 10%;
5. Pembangunan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Riau yang diharapkan mendorong perekonomian daerah agar semakin meningkat, seperti jalan tol, jalur kereta api, hingga pembangkit listrik;
6. Penetapan program perhutanan sosial yang mendorong pemulihan hak tanah ulayat adat.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Pemberian gelar adat kehormatan terhadap salah satu tokoh tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh LAM Riau.
2. Adanya sikap kontra dari tokoh masyarakat Riau terhadap keputusan LAM Riau dalam pemberian gelar adat kehormatan.

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Dinamika Penetapan Gelar Adat oleh**

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Tahun 2018”.

Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian : Bagaimana Dinamika Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Tahun 2018?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Dinamika Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Tahun 2018 :
 - a. Ustadz H. Abdul Somad, Lc., M.A
 - b. H. Sutardji Calzoum Bachri
 - c. Ir. H. Joko Widodo
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Tahun 2018 :
 - a. Ustadz H. Abdul Somad, Lc., M.A
 - b. H. Sutardji Calzoum Bachri
 - c. Ir. H. Joko Widodo

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di

¹¹<https://kabar24.bisnis.com/read/20181214/15/869689/mengapa-jokowi-diberi-gelar-adat-oleh-lam-riau-ini-alasannya>, diakses

pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 13.23 WIB.

dalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Dinamika Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Tahun 2018.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

Teori Formulasi Kebijakan

Islamy mengemukakan pendapatnya bahwa ada enam langkah perumusan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan masalah
2. Agenda kebijakan
3. Perumusan usulan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Pelaksanaan kebijakan
6. Penilaian kebijakan

Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembuatan kebijakan terbagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi RIAU.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau

Gelar adat yang ada di LAM Riau terbagi dua, Gelar Adat karena Jabatan dan Gelar Adat Kehormatan atau Gelar Adat Karena Jasa. Gelar adat juga diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LAM Riau. Sesuai yang tertera di Anggaran Rumah Tangga LAM Riau Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dapat memberi gelar adat kepada tokoh sesuai menurut alur, patut dan layaknya.

Tujuan dari penetapan gelar adat adalah untuk membesarkan adat dan budaya melayu. Karena itulah kriterianya berjasa luar biasa. Selain itu, tujuannya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada calon tersebut, menghargai jasa yang telah diberikan, seperti pepatah "*orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa*", jadi gelar itu adalah bahasa.

Proses penetapan gelar adat seperti yang tertera pada ketentuan penetapan gelar adat LAM Riau dilakukan dengan empat tahapan, yaitu Pra Pemberian Gelar, Pemilihan, Pengesahan dan Pengukuhan. Pada tahap Pra Pemberian gelar, LAM Riau menerima usulan pemberian gelar secara internal dari LAM Riau Provinsi dan atau kabupaten/kota;

Usulan juga dapat diterima dari perorangan dan atau kelompok masyarakat Melayu Riau; LAM Riau membentuk Tim Penapis Pemberian Gelar.

Sejauh ini usulan pemberian gelar adat diusulkan dari LAM Riau sendiri. Tim penapis anggotanya berasal dari MKA LAM Riau sendiri. Tugas tim penapis yaitu, mengumpulkan data-data calon yang akan diberi gelar adat, alasan layak atau tidaknya calon itu diberi gelar adat. usulan pemberian gelar adat itu dari masyarakat adat, maksud masyarakat adat itu pemangku adat dan pemuka adat.

Tahapan yang kedua proses penetapan gelar adat pada ketentuan penetapan gelar adat LAM Riau yaitu pemilihan. Pada tahap ini, Tim Penapis Pemberian Gelar menerima, meneliti, mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima gelar; Tim Penapis Pemberian Gelar menyampaikan hasil kerjanya kepada Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau; Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau melaksanakan rapat untuk membahas dan menetapkan pemberian gelar.

LAM Riau tidak sama dengan lembaga-lembaga lain. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh LAM Riau adalah pertimbangan adat, bukan pertimbangan di luar adat. Pertimbangan adat itu bersifat spesifik. Adat sudah bukan menjadi gaya hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang melihat adat itu bukan sebagai nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma-norma, melainkan lebih banyak merujuk kepada hal-hal yang diluar adat, sedangkan LAM Riau masih menggunakan pertimbangan-

pertimbangan adat. Dalam pertimbangan adat mengenal tiga prinsip pokok, yaitu Alur, Patut dan Layak. Alur, Patut dan Layak dalam pertimbangan adat lebih merujuk kepada persoalan-persoalan moral.

Proses musyawarah penetapan gelar adat dilakukan oleh MKA LAM Riau, DPH LAM Riau juga terlibat, karena ketua umum DPH Ex-Officio adalah anggota MKA LAM Riau. Jadi keputusan yang di keluarkan oleh MKA LAM Riau berkaitan dengan pemberian gelar adat adalah keputusan LAM Riau secara keseluruhan. Musyawarah tidak ada ditentukan berapa kali. Biasanya musyawarah itu membahas adanya usulan calon yang akan diberi gelar, layak atau tidak diberi gelar. Jika layak apa dasar-dasar pertimbangan calon itu diberi gelar, jika semua setuju gelar apa yang akan diberikan. Musyawarah itu ada internal dan eksternal. Musyawarah internal hanya dihadiri oleh MKA LAM Riau dan DPH LAM Riau, sedangkan musyawarah eksternal mengundang orang luar dari LAM Riau.

Saat proses musyawarah tidak dipungkiri bahwasannya timbul perbedaan pendapat. Saat proses pertimbangan bisa saja timbul perdebatan, tapi sebagaimana di dalam adat perdebatan itu berakhir saat keputusan itu diambil. Saat ketiga tokoh (Ustadz Abdul Somad, Sutardji Calzoum Bachri, dan Presiden RI Joko Widodo) akan diberikan gelar selalu ada perdebatan, tapi perdebatannya berbeda-beda. Jadi, yang dimusyawarahkan itu termasuk juga hal-hal yang tidak sempurna. Tujuannya bukan untuk menggagalkan, melainkan kalau suatu ketika ada orang yang bersuara tentang kelemahan dari tokoh yang

akan diberikan gelar, LAM Riau sudah tau. LAM Riau melihat itu dari sisi positif dan sisi negatif. Respon negatif sebelumnya sudah dikaji oleh LAM Riau, jadi bukan sembarangan gelar itu diberikan. Perbedaan pendapat tidak mempengaruhi proses pemberian gelar adat, apalagi jika sebagian besar menyetujui termasuk LAM Kabupaten/Kota. LAM Riau mempertimbangkan dari jasa yang telah diberikan oleh calon penerima gelar adat.

Tahapan yang ketiga proses penetapan gelar adat pada ketentuan penetapan gelar adat LAM Riau yaitu pengesahan. Pada tahap ini, MKA LAM Riau : Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Gelar; Menetapkan nama/sebutan gelar berikut atribut/kelengkapan yang akan dipakai penerima gelar; Menerbitkan Warkah Pengukuhan/Penabalan Gelar Adat.

Tahapan yang terakhir proses penetapan gelar adat pada ketentuan penetapan gelar adat LAM Riau yaitu pengukuhan. Pada tahap ini, Pelaksanaan Pengukuhan/Penabalan Gelar Adat dilaksanakan pada : Peringatan Hari Jadi LAM Riau; Hari-hari lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah MKA LAM Riau; Pengukuhan dilaksanakan dalam upacara penabalan dengan segala atur acaranya yang diadakan oleh LAM Riau.

Upacara penabalan gelar adat ada dua wilayah adat, di halaman dan didalam. Masing-masing tempat ada penanggung jawabnya. Di halaman ada namanya penghulu laman, di dalam ada namanya penghulu balai, dan dibantu oleh Datuk Bintara Kanan dan Datuk Bintara Kiri. Kalau Datuk Bintara Kanan itu, khusus untuk memimpin upacara penabalan

dibantu oleh Datuk Bintara Kiri untuk mengatur tamu-tamu duduk dan mengatur upacara penabalan. Saat upacara penabalan gelar adat calon yang akan diberi gelar dijemput. Ada satu rombongan lengkap dengan tepak, payung, tombak, hulubalang, dan segala macam. Dijemput sampai masuk ke halaman, disambut dengan menabur beras kunyit, diiringi dengan kompang sampai dengan ke depan Balai berhenti, karena ada acara silat. Setelah itu baru naik ke atas Balai, di depan pintu atas sudah ada yang menunggu Datuk Bintara Kanan dan Datuk Bintara Kiri untuk menyambut. Lalu, dipersilahkan di tempat VVIP dan masuklah upacara penabalan pemberian gelar adat.

Upacara penabalan gelar adat memiliki kegunaan dan tujuan. Guna upacara penabalan gelar adat itu adalah peresmian, pelantikan, pemasangan tanda-tanda kehormatan, paling penting pembacaan warkah. Di dalam warkah juga dijelaskan tujuan dari upacara penabalan itu mengumumkan kepada orang banyak.

Selain itu, penetapan gelar adat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu merisik, meminang dan menabalkan. Jika calon yang akan diberikan gelar setuju, maka pemberian gelar akan dilaksanakan. Tapi, jika tidak setuju maka pemberian gelar tidak jadi dilaksanakan.

Setiap proses penetapan gelar adat tidak dipungkiri bahwasannya adanya hambatan yang membuat proses tidak berjalan secara maksimal, seperti peralatan tidak cukup, kemampuan finansial yang tidak lancar. Karena dana LAM Riau

berasal dari APBD dan bantuan dari pihak-pihak yang tidak mengikat.

Penelitian ini menjelaskan yang terlibat di dalam proses penetapan gelar adat itu adalah LAM Riau, melalui proses yang dilakukan oleh tim, seperti MKA LAM Riau dan DPH LAM Riau. Tapi, tetap mendapatkan persetujuan dari anggota lain seperti, LAM Kabupaten/Kota, Pemangku Adat dan Pemuka Adat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau

Adapun dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan gelar adat oleh LAM Riau yaitu :

1. Adanya Jasa dari Masing-Masing Tokoh

Adanya jasa dari masing-masing tokoh, merupakan kriteria tokoh itu layak atau tidaknya mendapatkan gelar, baik secara lahiriah maupun batiniah, secara dalam maupun luar. Tahun 2018 ada 3 tokoh yang diberi gelar, seperti Ustadz Abdul Somad, Sutardji Calzoum Bachri dan Presiden RI Joko Widodo.

Jasa Ustadz Abdul Somad adalah melalui kewibawaannya juga menampilkan dirinya itu dalam citra kemelayuan Riau yang amat kental. Melalui dakwah Islam, ia mengharumkan nama Riau di luar batas daerah Riau sendiri, bahkan antarnegara. Kehadiran Ustadz Abdul Somad yang asli Riau ini sangat berpengaruh terutama untuk kalangan muda. Bahkan untuk kalangan tertentu, dengan mendengar ceramahnya, banyak yang tertarik dan mengubah perilaku.

Jasa Sutardji Calzoum Bachri karena ia memberi sumbangan luar biasa bagi kemajuan sastra Indonesia dan khususnya Riau, sudah dari mudanya mengabdikan diri dalam sastra. Sutardji adalah sastrawan, bahasawan terdepan yang menggunakan kekuatan-kekuatan warisan bahasa melayu sebagai kekuatan ekspresinya. Bagi Riau, hal tersebut menjadi makin bermakna karena dengan sadar ia berpijak pada tradisi yang ada di kawasan ini antara lain mantera sebagai medium pengabdian kata-kata. Dalam alam Melayu banyak sekali ungkapan senada, misalnya tergambar dari makna bahasa menunjukkan bangsa. Hal ini pasti lahir dari kepedulian yang besar terhadap keberadaan bahasa

Jasa presiden Jokowi terhadap Riau itu dapat kita lihat dan rasakan sejak 3 tahun terakhir Riau bebas dari bencana asap yang sudah diderita masyarakat Riau sejak 17 tahun. Kedua, dikeluarkannya Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Ketiga, dikeluarkannya Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Keempat, penetapan Pertamina sebagai pengelola blok migas Rokan di Provinsi Riau mulai 2021 mendatang, mendapatkan hak partisipasi sebesar 10%. Kelima, pembangunan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Riau yang diharapkan mendorong perekonomian daerah agar semakin meningkat, seperti jalan tol, jalur kereta api, hingga pembangkit listrik. Dan yang terakhir, penetapan program perhutanan sosial yang

mendorong pemulihan hak tanah ulayat adat.

2. Adanya Kepentingan Politik dari Salah Satu Tokoh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Azaly Djohan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Periode 2001-2006 dan Periode 2006-2011 LAM Riau bahwa tidak setuju, pemberian gelar kepada Presiden Jokowi banyak politisnya, berbeda dengan Presiden SBY. Presiden SBY jasanya terlihat dalam pembangunan daerah seluruh Sumatera. Salah satu tokoh yang pernah diberi gelar Bapak Syarwan Hamid juga tidak setuju Jokowi diberi gelar, waktunya tidak tepat pada saat musim politik seperti saat ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Tengku Nahar sebagai Wakil Ketua LAM Kabupaten Pelalawan bahwa tidak setuju terhadap pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo. Karena pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo itu menyalahi aturan adat, dipaksakan dan jasa Jokowi terhadap Riau sebenarnya belum kelihatan.

Menanggapi hal itu, Berdasarkan pernyataan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim bahwa kedatangan Presiden Joko Widodo ke Riau bukanlah kampanye, melainkan agenda kenegaraan. Agenda pemberian gelar adat oleh LAM Riau hanya agenda sisipan di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke Pekanbaru. Selain penabalan gelar adat, Presiden Joko Widodo juga akan membagikan 8.000 sertifikat tanah objek reforma agraria (TORA).

Hasil wawancara dengan Bapak Sarbaini sebagai Wakil Ketua DPH LAM Riau Kota Pekanbaru bahwa pemberian gelar adat kehormatan

kepada Presiden Joko Widodo adanya kepentingan politik yang dilakukan dari pihak LAM Riau sendiri maupun pemerintah. Karena mau pemilu supaya mendongkrak suara, setuju atau tidak yang lain ketuanya tetap menjalankan. Contohnya tol untuk kepentingan siapa? Bukan untuk rakyat pada umumnya, hanya untuk pengusaha, orang kaya, orang yang punya mobil, rakyat biasa hanya memakai sepeda motor. Jadi kepentingan itulah yang menghalalkan segala cara. Contoh dari sisi pemerintahan, kenapa gubernur dukung? Sebenarnya dia harus netral, karena dia sebagai penyelenggara. Tapi katena dia didorong supaya berpengaruh kepada masyarakat, supaya masyarakat mendukung, terjadilah seperti itu. Gunanya apa? Mengharapkan dukungan dari masyarakat supaya masyarakat setuju. Kalau gelar adat diberikan setelah selesai misalnya masalah pilpres mungkin tidak terjadi seperti adanya kontra. Ini pemberian gelarnya dilakukan pada saat detik-detik hari H pemilihan presiden. Alasan orang LAM Riau saja terlambat jika diberikan setelah pilpres. Dan itu sebenarnya tidak wajib. Seharusnya kalau kita lihat dari sisi melayunya, jika dia berjasa kepada masyarakat Riau pada umumnya dan itu didukung oleh masyarakat. Seharusnya gelar itu diberikan bukan diminta-minta, harus berdasarkan prestasi apa yang sudah dibuat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Dinamika Penetapan Gelar Adat oleh Lembaga Adat Melayu

(LAM) Riau Tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan :

1. Dinamika penetapan gelar adat yang dilakukan oleh LAM Riau belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adanya keterlibatan LAM Riau dalam politik sehingga menimbulkan berbagai respon kontra dari anggota LAM Riau, Organisasi kemasyarakatan Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau dan para Aktivistis Riau. Hal ini terjadi karena kepentingan-kepentingan yang dilakukan petinggi LAM Riau sehingga secara kelembagaan LAM Riau ikut terbawa arus dari Para Petinggi LAM Riau tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi penetapan gelar adat oleh LAM Riau yaitu adanya jasa dari masing-masing tokoh dan adanya kepentingan politik dari salah satu tokoh.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau agar lebih maksimal melakukan proses pemberian gelar adat dan lebih diperhatikan dalam menentukan kriteria calon penerima gelar adat.
2. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau agar terhindar dari tekanan-tekanan politik untuk menghindari terjadinya kontroversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Islamy, M. Irfan. 2016. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (cetakan ketujuh belas)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jamil, O.K Nizami. 2011. *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau.

Martono, Nanag. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, Slamet. 2009. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wiratma, Cahya. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing*. Bandung: PT Bentang Pustaka.

Zulkarnain, Wildan. 2014. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Bungsu, Puti. 2015. *Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP UR. No. 2, Vol. 2.

Oktaviani, Sri. 2018. *Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Bukit tinggi*. Jurnal Online Mahasiswa FKIP UR, No. 1, Vol. 5.

Skripsi

Fadilah, Yula. 2018. *Pemberian Gelar Adat (Studi Tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, Pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi FISIP Universitas Lampung.

PeraturanPerundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAM Riau Tahun 2012-2017.

Internet

<https://lamriau.id/profil-lam-riau/>, diakses pada tanggal 19

Desember 2018 pukul 12.25 WIB.

<https://lamriau.id/ketentuan-pemberian-gelar-adat-lam-riau/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 12.25 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20181214/15/869689/mengapa-jokowi-diberi-gelar-adat-oleh-lam-riau-ini-alasannya>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 13.23 WIB.

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/16/syarwan-hamid-demi-marwah-melayu-ini-jadwal-pengembalian-gelar-adatnya-kepada-lam-riau>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 16.18 WIB.

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/19/syarwan-hamid-kembalikan-gelar-adat-melayu-saya-berjuang-mendapatkan-gelar-adat-tersebut?>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 16.20 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 16.43 WIB.

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/31/ustaz-abdul-somad-akan-terima-gelar-adat-kehormatan-dari-lam-riau>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 16.04 WIB.

<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/01/31/gelar-adat-untuk-uas-disebut-spesial-ini-penjelasan-lam-riau>, diakses pada tanggal 3

- Februari 2019 pukul 20.09 WIB.
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/21/ini-alasan-ustaz-abdul-somad-terima-gelar-datuk-seri-ulama-setia-negara-dari-lembaga-adat-melayu>, di akses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.26 WIB.
- <http://m.riapos.co/189959-berita-sutardji-akan-dapat-gelar-datuk-seri-pujangga-utama.html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 20.25 WIB.
- <https://www.riamandiri.co/read/detail/65850/lam-riau-kapal-besar-terseret-badai>, diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 21.15 WIB.
- <https://riauterkini.com/sosial.php?ar=138392&judul=Besok,-Sutardji-Terima-Gelar-Adat--Datuk-Seri-Pujangga-Utama>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 23.37 WIB.
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sutardji-calzoum-bachri-dapat-gelar-datuk-seri-pujangga-utama/>, diakses pada tanggal 14 Februari pukul 23.40 WIB.
- <http://m.riapos.co/192366-berita--ingatkan-jokowi-ketika-dilantik.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 00.41 WIB.
- <http://m.riapos.co/192491-berita-massa-protos-perwakilan-lamrtak-kenakan-pakaian-adat-melayu-.html>, pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 00.47 WIB.
- <http://m.riapos.co/192062-berita-lam-riau-gelar-adat-jokowi-bukan-politis.html>, pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 00.48 WIB.
- <https://kumparan.com/selasar-riau/gelar-adat-untuk-jokowi-dari-lam-riau-di-tahun-politik-1543997826287228943>, pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 00.54 WIB.
- <https://www.inews.id/daerah/regional/presiden-jokowi-terima-gelar-adat-riau-datuk-seri-setia-negara/398593>, pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 00.58 WIB.
- <http://www.riauonline.co.id/riau/read/2018/12/14/demo-mahasiswa-riau-di-istana-negara-dihadang-massa-tandingan>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 15.09 WIB
- <https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2018/12/14/heboh-demo-gelar-kehormatan-jokowi-mahasiswa-angkat-suara/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 15.20 WIB
- <http://m.riapos.co/192080-berita-jrs-dukung-penabalan-gelar-adat-untuk-jokowi.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 17.00 WIB
- <http://m.riapos.co/192235-berita-gubri-jokowi-ke-riau-bukan-kampanye.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 14.40 WIB
- <http://m.riapos.co/191315-berita-24-november-presiden-jokowi-ke-riau.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 14.45 WIB
- <https://m.akurat.co/id-350269-read-%20jokowi-dikabarkan-%20mendapat-gelar-adat-%20melayu-ketua-mka-lam-riau-%20lam-jangan-dibawa-ke-%20politik>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 15.23 WIB.

